TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA

Faharudin, Setya Fitra Ramdhany

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia

Faharudin@unidayan.ac.id, Styaf09@gmail.com

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Ketatanegaraan Indonesia, dengan Pembimbing Faharudin Dan Nasrin. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Eksistensi Polri Menurut Tiga UUD dan Perubahan UUD 1945. Dan Untuk mengetahui Eksistensi Polri menurut Undang-undang Kepolisian Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah pada Fungsi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi. Dan Dalam hal ini berupa buku-buku, media internet, artikel, dan lainnya. Eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian penting dari dinamika hubungan antara kekuasaan eksekutif dan penegakan hukum dalam negara demokrasi. Setelah reformasi tahun 1998, Polri secara institusional dipisahkan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan secara konstitusional berada langsung di bawah Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan, fungsi, dan peran Polri dalam struktur ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi, undang-undang, dan praktik ketatanegaraan. Dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis dan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi, ditemukan bahwa Polri memegang posisi strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat. Namun demikian, eksistensinya juga menghadapi tantangan dalam hal akuntabilitas, pengawasan, dan independensi dari pengaruh politik. Penataan ulang peran Polri dalam kerangka checks and balances serta penguatan lembaga pengawasan eksternal menjadi penting untuk menjamin supremasi hukum dan demokrasi yang sehat. Kesimpulannya, eksistensi Polri harus terus diarahkan pada penguatan profesionalisme dan integritas agar dapat menjalankan tugas konstitusional secara efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci : Kepolisian, Ketatanegaraan, Peraturan Penegakan Hukum

ABSTRACT

The purpose of the research is to find out the Existence of the Indonesian National Police According to the Three Constitutions and Amendments to the 1945 Constitution. And to find out the Existence of the Indonesian National Police according to the Police Law. The type of research used by the author is normative legal research. The Primary Legal Material used is the 1945 Constitution. After the Amendment, the Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia, Legislation related to the implementation of regional government on the Function of Regional Heads in the Implementation of Regional Government in accordance with the principles of Democracy. And in this case in the form of books, internet media, articles, and others. The existence of the Republic of Indonesia National Police (Polri) in the Indonesian state system is an important part of the dynamics of the relationship between executive power and law enforcement in a democratic state. After the 1998 reforms, the Polri was institutionally separated from the Indonesian National Armed Forces (TNI) and constitutionally directly under the President as Head of Government. This study aims to examine the position, function, and role of the Indonesian National Police (Polri) within the Indonesian constitutional structure based on the constitution, laws, and constitutional practices. Using a normative-juridical approach and qualitative analysis of laws and official documents, it was found that the Polri holds a strategic position in maintaining public security and order, enforcing the law, and protecting and serving the community. However, its existence also faces challenges in terms of accountability, oversight, and independence from political influence. Restructuring the role of the Indonesian National Police (Polri) within the framework of checks and balances and strengthening external oversight institutions is crucial to ensuring the rule of law and a healthy democracy. In conclusion, the existence of the Indonesian National Police (Polri) must continue to be directed towards strengthening professionalism and integrity so that it can effectively carry out its constitutional duties within the Indonesian constitutional system.

Keywords: *Police, State Administration, Law Enforcement Regulations*

PENDAHULUAN

Tugas kepolisian, selain kepolisian sebagai alat negara penegak hukum yang menjalankan tugas represif yustisiil, juga melaksanakan tugas sosial dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi demikianlah yang menjadi ciri khas pekerjaan kepolisian, di satu sisi harus memelihara ketertiban dan di sisi lain diharuskan memeliharanya dengan jalan penegakan hukum. Sehingga kondisi seperti tersebut polisi akan mudah menjadi cercaan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Achmad Ali, bahwa:

“Aparat penegak hukum menjalankan dua tugas yaitu di satu pihak untuk mencapai ketertiban (*order*) dan di pihak lain untuk melaksanakan hukum (*law*). Ini tampak pada tugas kepolisian, mereka berbeda dua hal, yaitu hukum dan keter-tiban yang sering bertentangan, maka pekerjaan polisi pun paling gampang mendapat kecaman dari warga masyarakat”¹

Dari uraian di atas dapat ditarik pemahaman secara teoritik, bahwa fungsi utama kepolisian adalah untuk menghentikan sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi dan mendorong seseorang agar berbuat lebih baik sekarang²

Dalam buku “*polizeirecht*” yang dijelaskan, bahwa istilah polisi mempunyai dua arti yaitu:

1. Polisi dalam arti formal adalah mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian;
2. Polisi dalam arti material adalah memberikan jawaban terhadap persoalan- persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan- ketentuan yang diatur dalam peraturan atau undang- undang.³

Dari pengertian polisi tersebut secara substantif mengandung unsur-unsur pokok, yakni sebagai lembaga atau organ dan menunjuk rincian tugas dan wewenang. Drewry juga mendefinisikan tugas polisi antara lain: “*Police-men are instruments of public order, but there must to be said for keeping them apart from politics and government*”⁴

Dalam negara Indonesia, polisi menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku. Polisi adalah salah satu lembaga penegak hukum di negeri ini yang bertugas menjaga keamanan, dan ketertiban masyarakat. Jika terjadi suatu pelanggaran yang merugikan masyarakat, saat itu peran polisi dibutuhkan untuk membalikkan keseimbangan hidup. Kehadiran polisi idealnya sangat diharapkan untuk tidak memihak pihak tertentu, tetapi bertindak demi penegakkan hukum dan keadilan yang sesungguhnya.

¹ A Ali, “Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis” (philpapers.org, 2002), <https://philpapers.org/rec/ALIMTH>.

² D H Bayley, “Police For The Future, Disadur Oleh Kunarto,” *Cipta Manunggal*, 1998.

³ R Abdussalam, *Kriminologi* (library.stik-ptik.ac.id, 2007), <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5899&lokasi=lokal>.

⁴ J L Hobbes, “Rousseau. 2003,” *Lembaga Kepresidenan. FH UII Prees. Yogyakarta*, n.d.

Pembentukan kepolisian di Indonesia dapat ditelusuri sejak jaman kerajaan Majapahit yang diberi nama *Bhayangkara* untuk membedakannya dengan laskar perang biasa. Tugas pokok *Bhayangkara* adalah menjaga keselamatan raja dan keluarganya dan menjaga keselamatan negara dengan mengumpulkan informasi yang diperlukan raja terhadap kemungkinan-kemungkinan gangguan terhadap keamanan umum yang dapat mempengaruhi arus perdagangan atau segala sesuatu yang dapat mengganggu terciptanya rasa aman, sehingga penduduk mencari tempat lain yang dianggap lebih aman, atau bahkan memberontak terhadap raja Majapahit.⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga eksekutif dalam hal keamanan negara di seluruh wilayah negara Indonesia. POLRI memiliki peran untuk mewujudkan keamanan dalam negeri Indonesia yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena lembaga ini keberadaannya dianggap sangat penting, maka kekuasaan yang diberikan kepadanya ternyata dapat dimanipulasi oleh pemerintah yang berkuasa untuk berbagai tujuan politik guna melestarikan kekuasaan mereka. Itulah sebabnya dalam sejarah perkembangan demokrasi, fungsi kepolisian semakin memperoleh penajaman, dan wacana untuk itu tetap berkembang dari waktu ke waktu.

PEMBAHASAN

1. Eksistensi Polri Menurut Perubahan UUD 1945

Bergulirnya reformasi khususnya di bidang hukum merupakan angin baru bagi Polri, oleh karena itu melalui Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999, Polri dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Tindak lanjut dari Instruksi Presiden tersebut dikeluarkan Ketetapan MPR RI. No.: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Ketetapan MPR RI. No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Di dalam Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 khususnya dalam pasal 1 disebutkan, bahwa

⁵ H W Bachtiar, *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Baru* (library.stik-ptik.ac.id, 1994), <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=21117&lokasi=lokal>.

“Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing”. Peran TNI dan Polri dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2), ayat (1) yang menyebutkan, bahwa “Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara”, dan ayat (2) menyebutkan, bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan”. Dengan dilakukannya pemisahan tersebut, maka telah jelas bahwa secara kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terpisah dengan Tentara nasional Indonesia (TNI), dan istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dinyatakan tidak ada lagi. Kekuasaan Polri dijalankan di bawah Presiden mengandung konsekuensi logis, bahwa Polri di dalam menjalankan kekuasaannya bertanggungjawab kepada Presiden, dalam arti harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada Presiden.

Kekuasaan kepolisian dimaksud diperoleh secara atributif (*attributive*) maupun secara pelimpahan (*mandaatsverlening*) atau kekuasaan derivatif (*derevative*). Kekuasaan diperoleh secara atributif (*attributive*), karena kekuasaan kepolisian tersebut telah ditetapkan dalam amandemen UUD 1945 khususnya dalam pasal 30 ayat (4) yang intinya “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Selanjutnya mengenai kekuasaan kepolisian yang diperoleh melalui pelimpahan kekuasaan (*mandaatsverlening*) adalah dalam arti kekuasaan derivatif (*derevative*), yakni Polri menerima pelimpahan kekuasaan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) baik secara langsung maupun melalui Presiden. Kekuasaan yang diterima langsung dari MPR seperti Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1999 khususnya pasal 11 Bagian 4 yang mengatur tentang Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota MPR, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran Polri, sedangkan pendelegasian kekuasaan dari Presiden ditetapkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bila kita cermati substansi pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Esensi dari fungsi pemerintahan dimaksud, bahwa Polri dalam menjalankan perannya merupakan salah satu lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan (eksekutif) dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh Polri memiliki dua katogori, yakni fungsi sosial dalam tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dan fungsi penegakan hukum dalam kapasitasnya sebagai alat negara penegak hukum. Di dalam menjalankan kekuasaannya tersebut Polri menjalin hubungan kerja sama dengan badan, lembaga serta instansi lain. Dengan demikian Polri sebagai suatu lembaga mendapatkan kekuasaan baik secara atributif, derivatif maupun pendelegasian dari Presiden, yang tidak menutup adanya hubungan kerja antara Polri dengan lembaga-lembaga lain, sehingga operasional Polri mengenal adanya pembagian kerja yang juga dapat disebut pembagian kekuasaan.

2. Eksistensi Polri Menurut Undang-Undang Kepolisian.

Di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa kepolisian negara memiliki tugas pokok atau tugas utama dan tugas tambahan. Tugas utama yakni menjaga dan memelihara keamanan dalam negeri terhadap ancaman yang datangnya dari dalam. dengan melalui penegakan hukum, sedang tugas tambahan sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata yang sewaktu-waktu ikut berperang bersama-sama Angkatan Bersenjata yang lain (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara). Pembebanan tugas ini di samping kepolisian sebagai alat negara penegak hukum juga sebagai Angkatan Bersenjata, hal ini dipengaruhi juga pada saat menyusun Undang-undang kondisi negara sedang menyelesaikan revolusi dan kepolisian sebagai salah satu alat revolusi. Sejarah inilah yang

kemudian dijadikan pertimbangan dilakukannya integrasi antara Angkatan Bersenjata (TNI) dengan Polisi.

Secara filosofis dibentuknya juga Undang-undang No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-undang No. 13 Tahun 1961 untuk lebih memantapkan kedudukan, peranan dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum yang profesional. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Polri, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat. Di dalam ketatanegaraan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan ini lazimnya dijalankan oleh lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan (Kepala Eksekutif). Dilihat dari penjenjangan tanggungjawab pimpinan kepolisian bertanggungjawab kepada Presiden, di sini dapat dipahami bahwa tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Polri yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan, esensinya adalah tugas dan tanggungjawab Presiden, yang didelegasikan kepada Kepala Kepolisian (Kapolri). Lahirnya Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri sebagai pengganti Undang- undang No. 28 Tahun 1997 tidak dapat dipisahkan dengan adanya reformasi di bidang hukum yang terjadi di Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai hasil dari adanya reformasi. Dikatakan demikian, karena reformasi mampu mendobrak eksistensi Polri yang telah berpuluh-puluh tahun sebagai bagian atau unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dirubah sebagai Polri yang mandiri.

Secara filosofis lahirnya Undang-undang No. 2 Tahun 2002 karena terjadinya pergeseran paradigma dalam sistem ketatanegaraan, dan adanya penegasan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itulah maka kemudian diperlukan suatu Undang- undang Kepolisian yang sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia yang mampu menghilangkan watak militerisme yang sebelumnya masih melekat dan dominan pada perilaku Polri. Tujuannya adalah agar Polri mampu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan

dan terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Terlepas dari tugas dan wewenang di atas, ada hal yang sangat mendasar dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002, yakni sejak diberlakukannya Undang-undang dimaksud, maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada Peradilan Umum, sehingga permasalahan dan kasus-kasus pidana bagi anggota kepolisian diselesaikan pada Peradilan Umum, yang proses penyidikannya dilakukan oleh penyidik Polri. Dengan demikian berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 telah jelas bahwa Polri bukan lagi sebagai militer dan produk-produk administrasi kepolisian tidak lagi tunduk pada Tata Usaha Militer sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, akan tetapi masuk pada lingkup Pajabat Tata Usaha Negara yang tunduk pada Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat produk administrasi kepolisian sebagai produk Tata Usaha Negara, apabila berupa keputusan (*beeschiking*), maka masuk pada kategori sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan UUD 1945 secara eksplisit memperkuat eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi negara yang bersifat nasional dan berada di bawah presiden. Hal ini tercantum dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 (hasil amandemen) yang menyebutkan bahwa: *:Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum."* Dengan ketentuan ini, Polri: Diakui secara konstitusional sebagai institusi penting dalam sistem pertahanan dan keamanan negara, Memiliki mandat yang jelas, yaitu menjaga Kamtibmas, melindungi masyarakat, serta menegakkan hukum, Berada di bawah kekuasaan eksekutif (Presiden), berbeda dengan TNI yang memiliki struktur dan fungsi tersendiri dan Menjadi alat negara yang

netral, tidak terlibat dalam politik praktis dan harus mengedepankan profesionalisme.

2. Polri merupakan alat negara yang berperan penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Eksistensi Polri ditekankan sebagai institusi sipil nasional yang berada langsung di bawah Presiden dan memiliki kewenangan yang luas namun tetap diawasi dalam kerangka negara hukum demokratis. Fungsi dan kewenangannya harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sesuai prinsip-prinsip negara demokrasi dan supremasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R. *Kriminologi*. library.stik-ptik.ac.id, 2007. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5899&lokasi=lokal>.
- Ali, A. “Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis.” philpapers.org, 2002. <https://philpapers.org/rec/ALIMTH>.
- Bachtiar, H W. *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Baru*. library.stik-ptik.ac.id, 1994. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=21117&lokasi=lokal>.
- Bayley, D H. “Police For The Future, Disadur Oleh Kunarto.” *Cipta Manunggal*, 1998.
- Egon Bittner dalam David H, Beley, *Police For the Future disadur oleh Kunarto dkk*, Polisi Masa Depan, Cipta Manunggal, Jakarta 1998.
- Hobbes, J L. “Rousseau. 2003.” *Lembaga Kepresidenan. FH UII Prees. Yogyakarta*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.